

**Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2/446/2025
Lampiran XXIX**



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026



KECAMATAN SIDOREJO

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan serta peran serta masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

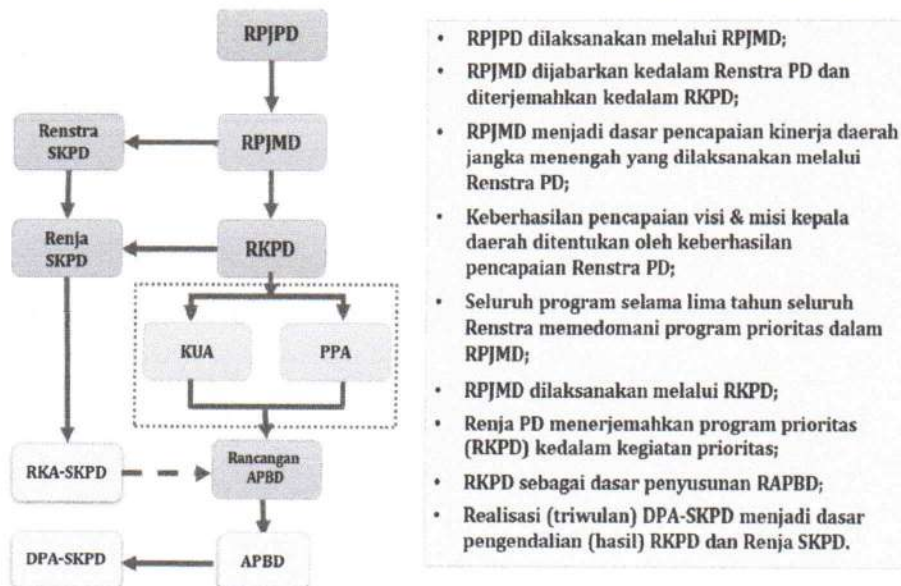
Berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat daerah agar menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagai persiapan penyusunan Renja Perangkat daerah dengan mempedomani Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja PD tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo tahun berjalan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidorejo adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sidorejo Tahun 2025-2029.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :



Adapun fungsi dari Rencana Kerja tersebut adalah :

1. Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sidorejo.
2. Merupakan indikator dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat sebagai adalah satu unsur potensi sumber daya masyarakat secara efektif, efisien.
3. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2026 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
22. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo Tahun 2026 adalah :

1. Memberi kerangka arah pembangunan dalam mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan program serta sebagai indikator dan tolok ukur kemampuan kinerja Kecamatan Sidorejo.
2. Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sidorejo;

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi Kecamatan Sidorejo yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026;

2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi serta menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo perlu adanya dukungan tugas dan fungsi Organisasi yang sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SIDOREJO TAHUN LALU

Bab II memuat uraian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo dan Capaian Renstra Kecamatan Sidorejo Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidorejo, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sidorejo, review analisis kebutuhan terhadap RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan;

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Bab III memuat uraian Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah dan program, kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Sidorejo Tahun 2026;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV memuat uraian tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 yang ditampilkan pada tabel yang berisikan Kode, Urusan,

Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif.;

BAB V : PENUTUP

Bab V memuat diantaranya Kesimpulan, kaidah pelaksanaan Rencana dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SIDOREJO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Sidorejo Tahun lalu dan Capaian RENSTRA Kecamatan Sidorejo Tahun 2025

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Sidorejo Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Sidorejo Tahun 2025 terhadap Capaian Renstra Kecamatan Sidorejo, serta Evaluasi terhadap proyeksi Capaian Renja untuk tahun berjalan Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sidorejo Tahun 2024

Tahun Anggaran 2024, program dan kegiatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sidorejo berjalan dengan baik. Kecamatan Sidorejo mengelola anggaran belanja Rp17.654.800.722,00 dengan 5 program, 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.221.223.716,00 atau sebesar 97,54%.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar 96% dan realisasi fisik sebesar 100%
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, realisasi anggaran 96% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - 2) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasi anggaran sebesar 96,53% dan realisasi fisik sebesar 100%.
Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi anggaran sebesar 96,50% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, realisasi anggaran 100% dan realisasi fisik sebesar 100%.

- 3) Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah realisasi anggaran sebesar 87,69% realisasi fisik 100%
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD realisasi anggaran sebesar 87,69 realisasi fisik 100 %
- 4) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasi anggaran sebesar 94,14% dan realisasi fisik sebesar 100%.
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi anggaran sebesar 98,86% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, realisasi anggaran sebesar 85,04% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Fasilitas Kunjungan Tamu, realisasi anggaran 100%, realisasi fisik 100%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan, realisasi anggaran sebesar 99,29% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi anggaran sebesar 89,54% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- 5) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi anggaran 98,16% dan realisasi fisik sebesar 100%.
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran sebesar 98,99% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi anggaran sebesar 82,60% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi anggaran sebesar 75,75% dan realisasi fisik sebesar 75%.
- 6) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi anggaran 99,95% dan realisasi fisik sebesar 100%.
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi anggaran sebesar 96,19% dan realisasi fisik sebesar 100%.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, realisasi anggaran sebesar 88,44% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, realisasi anggaran sebesar 96,96% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi anggaran sebesar 99,99% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi anggaran sebesar 96,40% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 1) Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan realisasi anggaran 95,74% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub Kegiatan :
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, realisasi anggaran sebesar 96,92% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- 2) Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, realisasi anggaran sebesar 91,98% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub Kegiatan :
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, realisasi anggaran sebesar 91,98% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 1) Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, realisasi anggaran sebesar 96,22% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub Kegiatan :
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, realisasi 96,22% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- 2) Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, realisasi anggaran sebesar 99,37% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub Kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, realisasi anggaran sebesar 100% realisasi fisik sebesar 100%
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, realisasi anggaran sebesar 99,24% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, realisasi anggaran sebesar 99,61% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- 1) Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, realisasi anggaran sebesar 99,29% dan realisasi fisik sebesar 100%
- Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan realisasi anggaran sebesar 99,29% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- 1) Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, realisasi anggaran sebesar 92,76% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset, realisasi anggaran sebesar 92,76% dan realisasi fisik sebesar 100%.

2.1.2. Evaluasi Capaian Renstra Tahun 2025

Perkiraan Realisasi Capaian Renstra Kecamatan Sidorejo sampai dengan Tahun 2025 belum dapat disajikan karena sampai dengan saat pembuatan Renja 2026 kegiatan tahun 2025 belum selesai dilaksanakan.

Realisasi Capaian Renstra sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 hampir semua indikator dapat tercapai berkat koordinasi, dukungan dari semua aparatur Kecamatan, kelurahan, Dinas/lembaga terkait, Linsek termasuk pemberdayaan masyarakat.

Adapun Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Sidorejo Tahun 2024 dan Target RENSTRA Kecamatan Sidorejo sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 (terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidorejo

Berdasarkan Peraturan Wali kota Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara berkala antara lain rapat koordinasi secara rutin yang meliputi bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban, pembangunan dan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral. Untuk meningkatkan kualitas aparatur telah dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparatur.

Dalam hal pelayanan publik Kecamatan Sidorejo telah melakukan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, melakukan pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat serta pelayanan konsultasi.

Selanjutnya di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan, Kecamatan Sidorejo berupaya memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan kemampuan, kemandirian masyarakat dan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya politik dan lingkungan hidup melalui penguatan lembaga kemasyarakatan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Strategi yang digunakan dalam rangka penyusunan konsep perencanaan pembangunan yang merupakan sumber aspirasi dan keinginan masyarakat dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Kecamatan Sidorejo.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidorejo Tahun 2024 berdasarkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target (%)	Capaian (%)
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	87	88,67
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2	%	93,53	88,97
3	Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan	%	59	64,96
4	Persentase PKK aktif	%	55	84,06

Nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2024, target yang ditetapkan 87%, capaian realisasi 88,67%. Adanya koordinasi yang baik di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta kesadaran masyarakat meningkat dalam hal permohonan pelayanan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, menjadi salah satu faktor keberhasilan capaian kinerja tersebut.

Dari target RENSTRA sebesar 93,53% di tahun 2024, Tingkat realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2 sebesar 88,97%. Belum adanya sanksi yang memberatkan menurut wajib pajak, menyebabkan belum maksimalnya pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan ini. Selain hal tersebut juga disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat belum stabil, harga kebutuhan pokok naik.

Prioritas usulan rencana pembangunan pada Tahun 2024 dengan target 59% terealisasi sebesar 64,96%. Salah satu faktor keberhasilan tercapainya target kinerja tersebut adalah adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat pada 4 (empat) kelurahan, yang mengakomodir usulan prioritas untuk dilaksanakan di masing masing kelurahan. Sedangkan salah satu faktor yang menghambat pencapaian target adalah banyaknya usulan yang tidak terakomodir oleh pihak (perangkat daerah) lain dikarenakan usulan musrenbang bukan merupakan prioritas bagi perangkat daerah lain.

Dalam upaya meningkatkan peran kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat dilakukan pembinaan, fasilitasi kegiatan, pemberian stimulan terhadap TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan, Kelompok PKK RW dan RT, serta LPMK. Hal tersebut merupakan salah satu yang menyebabkan keberhasilan pencapaian target. Target untuk kegiatan tersebut adalah 55% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 84,06%.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidorejo dapat dilihat di Tabel T-C.30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Pemerintah Kecamatan Sidorejo memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik yang efektif dan responsive. Upaya peningkatan kinerja kecamatan dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya dan menjalin sinergi antara aparat kecamatan, Lembaga masyarakat serta stakeholder terkait.

Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan diarahkan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan cepat, transparan, dan akuntabel.

Tingkat kinerja kecamatan dalam menjalankan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat saat ini menunjukkan hasil yang bervariasi, tergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta koordinasi dengan instansi yang lain dan peran masyarakat secara aktif cenderung menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Namun masih terdapat kendala-kendala. Hal-hal kritis terkait pelayanan masyarakat di Kecamatan Sidorejo adalah :

Tabel 2.3 Masalah yang dihadapi Kecamatan Sidorejo

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan.	Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan	- masih adanya pelayanan di kecamatan maupun kelurahan kepada masyarakat yang belum optimal
	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2	- masih belum semua SPPT PBB sampai kepada Wajib Pajak, - kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu juga masih belum sesuai dengan target yang ditentukan - Target pembayaran PBB di wilayah Kecamatan Sidorejo - masih belum memenuhi target.
	Belum optimalnya efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah	- belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat
	Belum optimalnya serapan usulan Masyarakat	- Usulan masih berdasarkan keinginan bukan kebutuhan - usulan masyarakat belum mengacu pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga usulan belum banyak yang direalisasikan - kurangnya pendampingan dari pihak terkait - OPD teknis tidak banyak terlibat dalam pengelompokan / penyusunan usulan
	belum optimalnya tindak lanjut permasalahan ketertiban dan keamanan melalui forkompincam	- masih belum terintegrasinya laporan permasalahan ketertiban dan keamanan di tingkat kecamatan - Permasalahan ketertiban dan keamanan di Tingkat wilayah belum terdata secara baik.

Hambatan yang dihadapi Kecamatan Sidorejo adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - Kurangnya pegawai yang kompeten dan terlatih dalam pelayanan publik.
 - Beban kerja tidak seimbang, terutama di wilayah yang padat penduduknya
 - Rendahnya literasi digital pegawai untuk pelayanan berbasis teknologi.
2. Sistem Pelayanan masih manual
 - Belum semua layanan dilakukan secara digital, sehingga prosesnya terkadang agak terlambat
 - Kurangnya integrasi sistem informasi kependudukan, sosial dan pelayanan lainnya
3. Belum optimalnya partisipasi dan kesadaran masyarakat
 - Masyarakat kurang aktif memberikan masukan atau saran menggunakan saluran pengaduan.
 - Tidak semua warga tahu tentang prosedur pelayanan atau hak mereka sebagai penerima layanan.
4. Pemberdayaan Masyarakat
 - Program pelatihan dan bantuan ekonomi yang sering tidak berkelanjutan
5. Pengelolaan Pengaduan
 - Belum tersedianya sistem pengaduan berbasis digital yang efektif
 - Tindak lanjut dari keluhan masyarakat yang masih lambat

Tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Sidorejo belum berjalan dengan optimal. Pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan yang baik selayaknya melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi Masyarakat (Participation), Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law), Transparansi (Transparency), Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus (Consensus), Kesetaraan (Equity), Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), Akuntabilitas (Accountability), dan Visi Strategis (Strategic Vision).

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Salatiga terlihat pada belum optimalnya pelayanan perangkat daerah di kecamatan/kelurahan. Kecamatan Sidorejo berkontribusi pada perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan dengan sasaran untuk meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Apabila permasalahan dan hambatan tersebut tidak segera diatasi akan berdampak juga pada visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta program prioritas yang akan dicapai.

Visi Wali kota dan Wakil Wali Kota Salatiga adalah " Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju

Salatiga yang Mendunia ”. Adapun misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga yang sesuai dengan kecamatan adalah misi ke-3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsive terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur. Tujuan Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia. Sasaran pemda adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital.

Adapun dampak dari permasalahan dan hambatan tidak segera diselesaikan adalah target arah kebijakan pemerintah “Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan” tidak akan tercapai, dengan demikian visi, misi tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tidak akan terwujud.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan, antara lain :

- Melalui penguatan kecamatan berbasis digital, sistem online dan pelayanan terpadu.
- Mengintegrasikan pelayanan kecamatan ke dalam aplikasi layanan publik dan mudah diakses.
- Kecamatan berperan sebagai penghubung antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat yang terwujud dalam musrenbang kelurahan atau musrenbang kecamatan.
- mengupayakan kegiatan untuk meminimalisasi hambatan yang ada.

Semakin diperkuatnya peran kecamatan dalam pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, maka tata pemerintahan yang inklusif dan partisipatif dapat terwujud. Hal ini tidak hanya mempercepat visi-misi Wali Kota tetapi juga menciptakan kecamatan lebih adaptif, efisien dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan ditingkat kecamatan menjadi pilar penting dalam mewujudkan kota yang lebih manusiawi, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sidorejo mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja, tantangan yang dihadapi Kecamatan Sidorejo antara lain:

- 1) Kecamatan hanya sebagai koordinator dalam penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya, sehingga ada beberapa kegiatan harus menyesuaikan dulu dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaannya;
- 2) Kurang optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dalam realisasi hasil musrenbang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 3) Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif;
- 4) Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku;

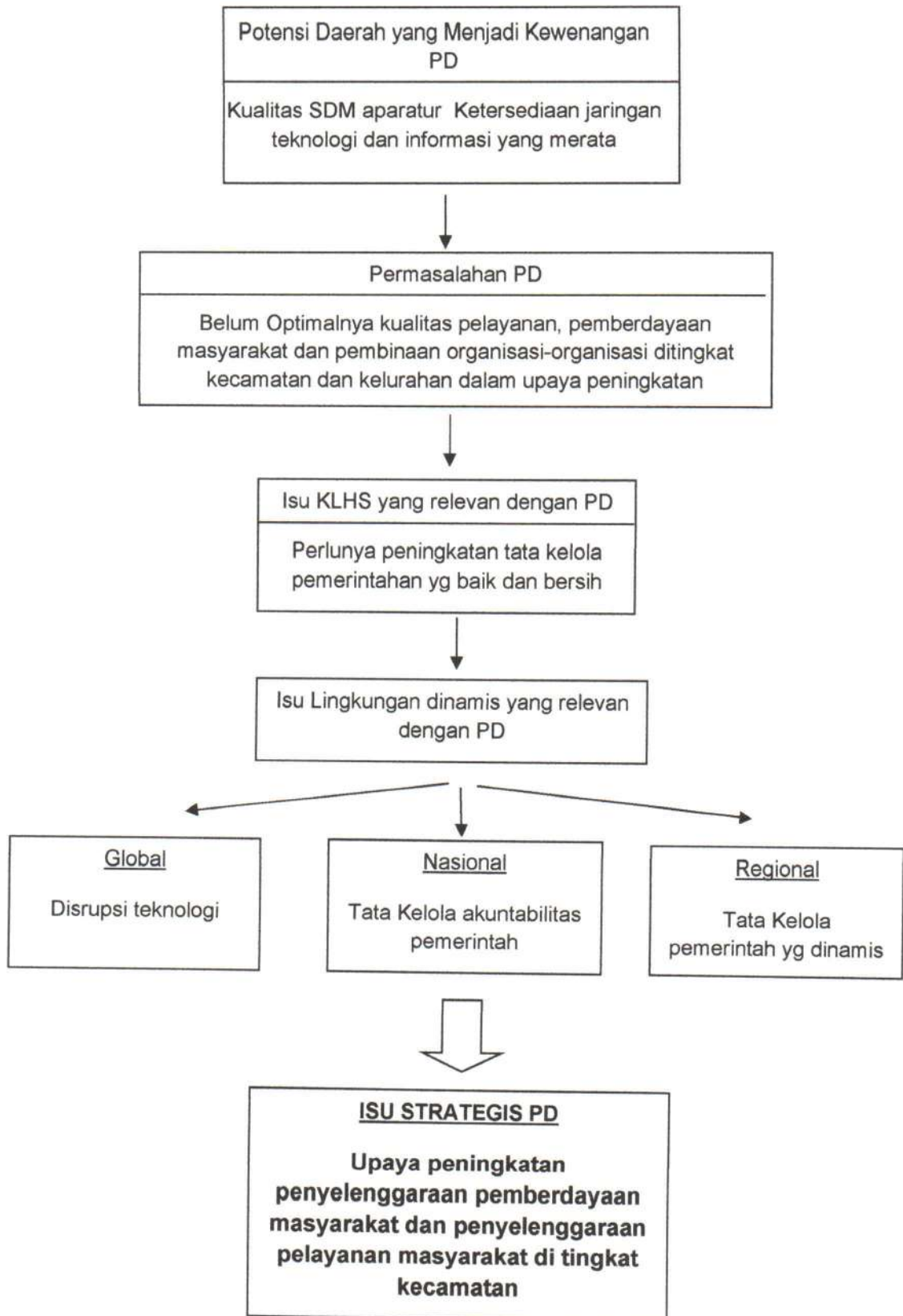
Adapun peluang Kecamatan Sidorejo adalah sebagai berikut :

- 1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kecamatan Sidorejo untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Membuat perencanaan yang matang dan terorganisir untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat mengakomodir usulan pembangunan dari masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
- 4) Penguatan kelembagaan masyarakat di kelurahan dan kecamatan untuk dapat saling koordinasi dan melakukan hubungan yang baik antara aparat pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan serta lembaga lintas sektoral untuk bersama-sama memberikan kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat pembangunan;
- 5) Implementasi Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sehingga usulan pembangunan bisa direalisasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan

Berdasarkan pada situasi, kondisi dan permasalahan dan hambatan Kecamatan Sidorejo diatas dan diselaraskan dengan prioritas peningkatan pelayanan prima di kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus di kecamatan yaitu "Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di kecamatan".

Adapun Isu strategis merupakan hal yang tak terpisahkan dari potensi, permasalahan PD, isu KLHS yang relevan dengan Kecamatan Sidorejo, serta isu lingkungan dinamis yang relevan, dengan gambaran sebagai berikut :

Isu Strategis Kecamatan Sidorejo



Secara keseluruhan, peningkatan penyelenggaraan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan memerlukan pemahaman secara keseluruhan yang melibatkan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan kolaborasi atau kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat karena harapannya menjadi ujung tombak pelayanan publik yang prima dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

2.4 Review terhadap RKPD 2026 dan Analisa Kebutuhan

Review terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan RKAPD dan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran. Sangat perlu mereview RKPD dengan Analisis Kebutuhan Tahun 2026 karena berbagai pertimbangan dan kondisi serta kebijakan yang dinamis secara otomatis hasil Analisa kebutuhan tahun 2026 berbeda dengan RKPD tahun 2026.

Secara umum, hasil review terhadap RKPD Kecamatan Sidorejo telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD dan analisis kebutuhan sudah sama jadi tidak ada perbedaan.

Adapun review antara RENSTRA dan hasil analisa kebutuhan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel T-C.31 (terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas usulan pembangunan di wilayah. Musrenbang di tingkat kecamatan merupakan rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari Pra Musrenbang di tingkat RT dan RW, Musrenbang Kelurahan dan terakhir di Kecamatan. Proses Musrenbang ini melibatkan berbagai stakeholders seperti unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk pelibatan perempuan dan anak secara terintegrasi dan partisipatif. Adapun hasil musrenbang tahun 2025 yang disetujui ada 21 paket kegiatan yang disetujui untuk diusulkan lewat OPD terkait.

Tahun 2026 Kecamatan Sidorejo juga mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan TMMD di RT 01 RW IV Kelurahan Pulutan berupa betonisasi jalan dan ini merupakan kegiatan lanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, dan berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Renstra maka kegiatan TMMD relevan dan sesuai untuk dilaksanakan.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Sidorejo Tahun 2027 tertuang dalam Tabel T-C.32

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, antara lain bertujuan untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sidorejo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Dukungan Program dan Kegiatan Daerah Terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program	Aktivitas
1	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Melakukan Monev Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di wilayah
			Menyelenggarakan survei Kepuasan Masyarakat, Forum Konsultasi Publik

- Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2026 adalah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Sasaran : Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Nasional

Arah Kebijakan : Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Dengan demikian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mendukung Program Prioritas Nasional.

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 adalah "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai lumbung Pangan Nasional". Tahun 2026 juga diarahkan untuk tema pembangunan daerah, yaitu "Penguatan Landasan Pembangunan Daerah" dengan prioritas daerah Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan dinamis.

Arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026 berdasarkan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 yang direpresentasikan melalui tema pembangunan “Peningkatan Pembangunan SDM dan pengelolaan potensi perekonomian daerah didukung pemerintahan berintegritas dan infrastruktur berkualitas”

Sasaran jangka menengah Kecamatan Sidorejo adalah peningkatan peran kecamatan dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian sasaran jangka menengah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas aparat kecamatan dan kelurahan dengan cara mengusulkan pelatihan ke BKPSDM dan melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan SDM;
2. Peningkatan kinerja aparat kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan PBB;
3. Mengoptimalkan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pra musrenbang dan pengawalan usulan hasil musrenbang; dan
4. Melakukan sosialisasi tentang 10 program pokok PKK, pemberian insentif, dan pembinaan wilayah.

Kebijakan Kecamatan Sidorejo Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan kualitas pelayanan, administrasi tingkat kecamatan dan kelurahan, mengembangkan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan.

Adapun dukungan program dan kegiatan daerah terhadap priotiras provinsi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Dukungan Program dan Kegiatan Daerah Terhadap Prioritas Provinsi

No	Provinsi	Kota Salatiga
1	Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumberdaya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
2	Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional - Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
3	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Kecamatan Sidorejo mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam rangka menjawab isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan.

Adapun tujuan Kecamatan Sidorejo Tahun 2025-2029 berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan.”

Sedangkan Sasarannya adalah “Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintahan kecamatan, dan Meningkatnya kualitas akuntabilitas kecamatan.”

Strategi Kecamatan Sidorejo adalah “Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan antara kelurahan, kecamatan, opd dan masyarakat serta para pemangku kepentingan, penyediaan data dan pendukung perencanaan pembangunan.”

Kebijakan Kecamatan Sidorejo Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan kualitas pelayanan, administrasi tingkat kecamatan dan kelurahan, mengembangkan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan. Adapun tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sidorejo dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3
 Tujuan, Sasaran dan Target Renja 2026

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
					2026
NSPK : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan.		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	76
Sasaran RPJMD : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital		Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintahan kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	76
		Meningkatkan kualitas akuntabilitas kecamatan	Persentase Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	%	76

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penyusunan program dan kegiatan, Kecamatan Sidorejo tetap mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan yang disusun Pemerintah Kota Salatiga sesuai dengan tahun berkenaan.

Adapun dukungan program dan kegiatan terhadap prioritas kota adalah sesuai dengan tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas dan Kota

No	Prioritas Kota	Program	Aktifitas
1	PROGRAM SI AKAS (Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Publik	Monev Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan
2	PROGRAM SEHATI: Salatiga Sehat Terlindungi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembentukan Posyandu 6 SPM, RPPA, Kegiatan PKK, LPMK dll

3.3 Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sidorejo Tahun 2026 berdasarkan Renstra Kecamatan Sidorejo Tahun 2025-2026 terdiri dari :

- 5 (lima) Program
- 14 (empat belas) Kegiatan
- 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sidorejo Tahun 2026 ditampilkan pada tabel yang berisikan Kode, Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 sesuai tabel T-C.33 terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo Tahun 2026 maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo Tahun 2026 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

- Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidorejo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidorejo Tahun 2026 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan kewilayahan.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 adalah sebanyak 5 program yang terdiri dari 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Kecamatan Sidorejo Tahun 2026 secara total sebesar Rp19.241.777.000,- yang bersumber dari dana APBD Kota Salatiga.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 ditunjukkan dalam tabel Renja Kecamatan Sidorejo sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan Pemerintah Kota Salatiga masih akan mengalami kehidupan yang dinamis yang memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Sidorejo untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Renja Kecamatan Sidorejo Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Sidorejo itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Sidorejo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Sidorejo Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kota Salatiga sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Sidorejo Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Sidorejo mendapat alokasi anggaran untuk belanja sebesar 19.241.777.000,00 (Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan :

1. Seluruh pejabat struktural di Kecamatan agar mengawal pelaksanaan renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;

3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindak lanjut perbaikan dalam pelayanan perangkat daerah untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepercayaan publik terhadap pemerintah :

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;

Melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan para pegawai negeri agar dapat memberikan pelayanan yang lebih professional.

2. Digitalisasi dan Inovasi Layanan Publik;

Mengimplemtasikan *e-government* dan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparasi, dan memudahkan akses bagi masyarakat.

3. Pengawasan dan Akuntabilitas yang Ketat;

Menetapkan sistem pengawasan yang transparan, memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program, serta melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Perbaikan Infrastruktur dan Sistem Informasi;

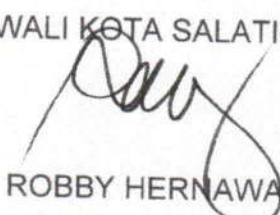
Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik seperti sistem IT

5. Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi.

Menjaga sinergi antara perangkat daerah, sehingga kebijakan program yang dijalankan dapat berjalan secara terpadu dan tidak tumpang tindih atau kebijakan yang bertentangan.

Hal mendasar yang akan menjadi pendukung dan menumbuhkan benang merah kerjasama adalah kepedulian dan koordinasi antar instansi atau OPD terkait, tanpa pemahaman untuk kerjasama antar OPD terkait akan sulit rasanya semua rancangan kegiatan yang terprogram ini dapat terlaksana. Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan untuk memudahkan tujuan secara terukur dan dicapai. Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

WALI KOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN

LAMPIRAN

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kota Salatiga
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sidorejo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023			Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2025	
					4	5	6	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3									9	1025 10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01	Unsur Kewilayahan												
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan	%	100,00			100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	88,68			88,68	88,68	88,68	1,00	88,68	88,68	1,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	69,16			69,16	69,16	69,16	1,00	69,16	69,16	1,00
7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00			100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
7 01 01 2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9		9	10	9	10,00	0,90	10	10,00	1,11
7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00			100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
7 01 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	61		65	70	65	70,00	0,93	70	70,00	1,15
7 01 01 2.02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1		1	1	1	1,00	1,00	1	1,00	1,00
7 01 01 2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	%	100,00			100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
7 01 01 2.03 02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	2		1	1	1	1,00	1,00	1	1,00	0,50
7 01 01 2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100										
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan											
7 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
7 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00			100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
7 01 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	7		7	7	7	7,00	1,00	7	7,00	1,00
7 01 01 2.06 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	7		7	7	7	7,00	1,00	7	7,00	1,00
7 01 01 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	7		7	7	7	7,00	1,00	7	7,00	1,00
7 01 01 2.06 05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	7		7	7	7	7,00	1,00	7	7,00	1,00
7 01 01 2.06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	dokumen	2		2	2	2	2,00	1,00	2	2,00	1,00
7 01 01 2.06 08	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	2		1	2	2	2,00	1,00	2	2,00	1,00
7 01 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke SKPD	Laporan	30		30	30	38	30,00	1,27	30	30,00	1,00
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100		0	100	0	100,00	0,00	100	100,00	1,00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2025	
1	2					4	5	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
7 01 01 2.07 06	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Unit	4	0	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01 2.07 10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
7 01 01 2.07 11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
7 01 01 2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	7	0	0	7	0	0,00	7	7,00	1,00
7 01 01 2.08 01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	100,00	100,00	100,00	100	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
7 01 01 2.08 02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1,00	1	1,00	1,00
7 01 01 2.08 03		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	1,00	12	12,00	1,00
7 01 01 2.08 04		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	0	1	1	0	0	0,00	-	0,00	0,00
7 01 01 2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpelihaaranya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	12	12	12	12	12	1,00	12	12,00	1,00
7 01 01 2.09 01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
7 01 01 2.09 02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	2		1	1	1,00	1	1,00	1,00
7 01 01 2.09 09		Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau direhabilitasi	Unit				45	45	1,00	45	45,00	1,00
7 01 01 2.09 10		Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Unit	7	7	7	7	7	1,00	7	7,00	1,00
7 01 01 2.09 11		Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara / direhabilitasi	Unit	30	30	30	30	30	1,00	30	30,00	1,00
7 01 02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	7	7	7	7	7	1,00	7	7,00	1,00
			Prosentase Peningkatan Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	1,12	-2,80		0,92	-0,01	-0,01	1,00	1,00	0,89

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2025	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 02 2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
7 01 01 2.01 02	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	laporan	7	7	7	7	1,00	7	7,00	1,00
7 01 02 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
7 01 01 2.02 03	Sub Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	2	2	2	2	1,00	2	2,00	1,00
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	%	55,00	53,49	45,00	64,96	1,44	50	50,00	0,91
7 01 03 2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas kegiatan pemberdayaan	%	65,00	64,18	55,00	84,06	1,53	60	60,00	0,92
7 01 03 2.01 03	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	7	7	7	7	1,00	7	7,00	1,00
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	%	55,00	53,49	45,00	64,96	1,44	50	50,00	0,91
7 01 01 2.02 01	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	7	7	7	7	1,00	7	7,00	1,00
7 01 01 2.02 02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (6kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	unit	7	7	7	7	1,00	7	7,00	1,00
7 01 01 2.02 03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan (6kelurahan)	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Pokmas /ormas	4	4	4	4	1,00	4	4,00	1,00
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase upaya peningkatan ketentrman dan ketertiban									
7 01 05 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
7 01 05 2.01 08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	1	1	1,00	1	1	1,00
7 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	69,10	65,00	68,90	68,81	1,00	69	69,00	1,00
7 01 06 2.01	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Prosentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	93,55	91,84	93,53	88,97	0,95	93,54	92,00	0,98
7 01 06 2.01 03	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Dokumen	2	2	2	2	1,00	2	2	1,00

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo
Kota Salatiga

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		%	87,00	88,00	89,00	89,00	88,67		89,00	89,00	
2	Persentase penyampaian SPPT PBB P2		%	93,53	93,54	93,55	93,55	88,97		93,55	93,55	
3	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang		%	59,00	59,00	60,00	60,00	64,96		60,00	60,00	
4	Prosentase PKK Aktif		%	55,00	60,00	65,00	65,00	84,06		65,00	65,00	

Tabel T-C.31
Review terhadap RKPD pada Tahun 2026
Kota Salatiga

RKPD pada Tahun 2026											Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026				Catatan Penting	
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja(output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				(12)		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	11.062.915	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sidorejo	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100%	11.062.915,000						
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,68												
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,16												
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	10.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sidorejo	Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	10.000						
a	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Salatiga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	10.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kecamatan Sidorejo	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	9 laporan	10.000						
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	100	8.920.397,500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sidorejo	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	8.920.397,500						
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	8.280.397,500	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Sidorejo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	8.280.397,500						
b	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	640.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kecamatan Sidorejo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	640.000						
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Salatiga	Prosentase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	100	50.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sidorejo	Prosentase terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	100%	50.000						
a	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	50.000	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Kecamatan Sidorejo	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD	2 dokumen	50.000						
4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Salatiga	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	40.000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kecamatan Sidorejo	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi perangkat daerah	100%	40.000,0						
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Salatiga	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Kecamatan Sidorejo	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	-						
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70	40.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sidorejo	Jumlah orang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 orang	40.000						
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	318.320	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sidorejo	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	318.320						
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	16.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sidorejo	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 paket	16.000						
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	15.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sidorejo	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 paket	15.000						
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	107.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sidorejo	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 paket	107.000						
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	28.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sidorejo	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	28.000						
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	19.320	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Sidorejo	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2 dokumen	19.320						
f	Facilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	3.000	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sidorejo	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	2 laporan	3.000						

RKPD pada Tahun 2026

RKPD pada Tahun 2026							Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026				Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja(output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	110.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sidorejo	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	110.000	
h	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Salatiga	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD	1	20.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Sidorejo	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD	1	20.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	646.157,5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sidorejo	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	646.157,5	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sidorejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	-	
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	538.515,5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sidorejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	538.515,5	
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	107.642	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sidorejo	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	7 unit	107.642	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	78.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sidorejo	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90%	78.000	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sidorejo	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	3.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	75.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sidorejo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	75.000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sidorejo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1.000.040	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sidorejo	Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.000.040	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	35.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sidorejo	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	35.000	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45	70.040	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sidorejo	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	45 unit	70.040	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	850.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sidorejo	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	7 unit	850.000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	30.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sidorejo	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara / direhabilitasi	30 unit	30.000	
e	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	15.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sidorejo	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	7	15.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Salatiga	Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	80	239.900,0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sidorejo	Prosentase peningkatan skor indeks kepuasan masyarakat	85,00%	239.900,000	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Salatiga	Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	197.900,0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sidorejo	Prosentase terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	197.900,0	

RKPD pada Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026

RKPD pada Tahun 2026											Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja(output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Salatiga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	197.900,0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sidorejo	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	7 dokumen	197.900,0	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Salatiga	Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100	42.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Sidorejo	Prosentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan	100%	42.000	
a	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Salatiga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	42.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sidorejo	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2 laporan	42.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Salatiga	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	65	7.636.962,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sidorejo	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	70%	7.636.962,000	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Salatiga	Persentase partisipasi masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Prosentase peningkatan partisipasi	100	280.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sidorejo	Prosentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas kegiatan pemberdayaan	100%	280.000	
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Salatiga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	280.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sidorejo	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	2 laporan	280.000	
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Salatiga	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	7.356.962,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sidorejo	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	100%	7.356.962,000	
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Salatiga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	86.962	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sidorejo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang di kelurahan	7 lembaga	86.962	
b	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	3.711.658,0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Sidorejo	Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan	7 unit	3.711.658,0	
c	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Salatiga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	3.558.342,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sidorejo	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4 pokmas	3.558.342,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Salatiga	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	100	89.975,200	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6 kelurahan	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban	100%	89.975,20	
		Salatiga	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100			6 kelurahan	Prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	100%		
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Salatiga	Prosentase Terlaksananya kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	89.975,200	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sidorejo	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100%	89.975,200	
a	Fasilitasi, kordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi,konsultasi)wasbang dan Ket Nas	Salatiga	Jumlah dokumen tugas fasilitasi,koordinasi dan pemb wasbang dan Ket Nas	1	45.115,800	Fasilitasi, kordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi,konsultasi)wasbang dan Ket Nas	Kecamatan Sidorejo	Jumlah dokumen tugas fasilitasi, koordinasi dan pemb wasbang dan Ket Nas	1 dokumen	45.115,800	
b	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Salatiga	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	44.859,400	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kecamatan Sidorejo	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 dokumen	44.859,400	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Salatiga	Persentase realisasi WP yang membayar PBB	83	212.024,800	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sidorejo	Prosentase wajib pajak yang membayar PBB P2		212.024,800	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Salatiga	Persentase penyampaian SPPT PBB kepada Wp	93,55	212.024,800	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sidorejo	Prosentase penyampaian SPPT PBB pada WP	93,55	212.024,800	

RKPD pada Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja(output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Salatiga	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	146.402,400	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Sidorejo	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	2 dokumen	146.402,400	
a	Fasilitasi penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum	Salatiga	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum	1	65.622,4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Sidorejo	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	1 dokumen	65.622,4	
					19.241.777,00					19.241.777,00	

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kota Salatiga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sidorejo

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec Sidorejo		Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel		
1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (TMMD)	RT 01 RW IV Kelurahan Pulutan	Pulutan	Betonisasi jalan	1 paket	Merupakan usulan dari masyarakat melalui TNI, Sumber Dana APBD dan Bankeu
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (usulan musrenbang yang disetujui)	Samping balai RW.10 Brajan, Blotongan (-7.302,110.476), Kota Salatiga	Blotongan	Drainase & Saluran Air	75 m	Merupakan usulan dari masyarakat melalui Musrenbang Sumber Dana APBD yang disetujui melalui OPD terkait
		Jl. Nutlira & Jl. Pemandangan II, Kota Salatiga	Bugel	Jalan & Jembatan	1 paket	
		RW03, Kota Salatiga	Bugel	Jalan & Jembatan	1 Paket	
		RW03, Kota Salatiga	Kauman Kidul	Drainase & Saluran Air	150 m	
		Jl. Jiten RW 5 Pulutan, Kelurahan Pulutan CP.:Pak Sholli (0858 0358 8430), Kota Salatiga	Pulutan	Drainase & Saluran Air	180 m	
		RW10 Perum Domas -7.31236070800316, 110.50405025482179, Kota Salatiga	Salatiga	Cermin Cembung, Rambu Lalu Lintas, Pita Kejut	40 m2	
		Jalan Kemiri II, RW 11 -7.316088902267721,110.5002549292943, Kota Salatiga	Salatiga	Drainase & Saluran Air	1 Paket	
		RT. 04 dan RT. 02 RW. XIII, Kota Salatiga	Sidorejo Lor	Drainase & Saluran Air	240 m	
		RT.01,02 RW.04 Ngampel Blotongan, Salatiga, Kota Salatiga	Blotongan	Tanggul Sungai, Irigasi	1 paket	
		Depan balai RW.13 Kota Baru Kai Blotongan, Kota Salatiga	Blotongan	Drainase (perbaikan/rehabilitasi, pembangunan)	1 paket	
		Jl. Ngosari, Kota Salatiga	Bugel	Pengadaan/Pemasangan Cernih Ikungan, pita pengkadul, quardrail	4 unit	
		Jl. K Pitrang RT. 02 RW. 03, Kota Salatiga	Kauman Kidul	Drainase (perbaikan/rehabilitasi, pembangunan)	1 paket	
		RT 1 RW 4, dan RT 3 RW 4, Kota Salatiga	Pulutan	Drainase (perbaikan/rehabilitasi, pembangunan)	1 paket	
		Kelompok tani sido umbul 1 di RW II, Kota Salatiga	Pulutan	Bantuan Benih Tanaman (padi, alpukat, cabai, durian dan sayurod lainnya)	1 Paket	
		Kelompok Tani Makmur 2 di RW III, Kota Salatiga	Pulutan	Bantuan Benih Tanaman (padi, alpukat, cabai, durian dan sayurod lainnya)	1 Paket	
		Jl. Kamuning, RW 02 Rekesan CP Seksi Pembangunan RW 2 Rekesan (0815-5510-235), Kota Salatiga	Salatiga	Drainase (perbaikan/rehabilitasi, pembangunan)	1 paket	
		Jl. Pamuka RW 05, Krajan CP.1etua RW Krajan (0856-4128-2261), Kota Salatiga	Salatiga	Drainase (perbaikan/rehabilitasi, pembangunan)	1 paket	
		Perum Puri Satya RW 11 Kemiri CP. RW 11 Kemiri (0895-3262-97273), Kota Salatiga	Salatiga	Drainase (perbaikan/rehabilitasi, pembangunan)	1 paket	
		RT. 008 dan RT. 009 RW. 008, Kota Salatiga	Sidorejo Lor	Drainase (perbaikan/rehabilitasi, pembangunan)	263 meter	
		Jl. Kjal Wahid Hasyim RT. 001 RW. 013, Kota Salatiga	Sidorejo Lor	Tanggul Sungai, Irigasi	1 paket	
		Jl. K/Penjaw no. 19, Sidorejo Lor, Kota Salatiga	Sidorejo Lor	Penataan Bangunan Gedung	1 paket	

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sidorejo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Salatiga	100%	11.062.915,000	APBD	-	100	12.012.000
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	100%	10.000	APBD	-	100	10.000
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	10 laporan	10.000	APBD	-	7	10.000
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Salatiga	100%	8.920.397,500	APBD	-	100	10.890.000
7 01 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	70	8.280.397,500	APBD	-	70	10.800.000
7 01 01 2.02 02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	1 dokumen	640.000	APBD	-	1	90.000
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	Salatiga	100%	50.000	APBD	-	100	50.000
7 01 01 2.03 02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	1 dokumen	50.000	APBD	-	1	50.000

7 01 01	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Salatiga	100%	40.000	APBD	-	100	107.000
7 01 01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Salatiga	70 orang	40.000	APBD	-	70	107.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Salatiga	100%	318.320	APBD	-	100	375.000
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Salatiga	7 paket	16.000	APBD	-	7	16.000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Salatiga	7 paket	15.000	APBD	-	7	17.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Salatiga	7 paket	107.000	APBD	-	7	115.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Salatiga	7 paket	28.000	APBD	-	7	30.000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Salatiga	2 dokumen	19.320	APBD	-	2	18.000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	2 laporan	3.000	APBD	-	2	4.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	30 laporan	110.000	APBD	-	30	150.000
7 01 01 2.06 10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Salatiga	12 dokumen	20.000	APBD	-	0	25.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Salatiga	100%	646.157,5	APBD	-	100	200.000

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Salatiga	0	-	APBD	-	0	-
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Salatiga	7 unit	538.515,5	APBD	-	7	100.000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Salatiga	7 unit	107.642	APBD	-	7	100.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Salatiga	90%	78.000	APBD	-	100	78.000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	1 laporan	3.000	APBD	-	1	3.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Salatiga	12 laporan	75.000	APBD	-	12	75.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Salatiga	100%	1.000.040	APBD	-	100	302.000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Salatiga	1 unit	35.000	APBD	-	1	35.000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Salatiga	45 unit	70.040	APBD	-	45	70.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Salatiga	7 unit	850.000	APBD	-	7	150.000

7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Salatiga	30 unit	30.000	APBD	-	30	30.000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Salatiga	7 unit	15.000	APBD	-	7	17.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Skor IKM	Salatiga	1,12%	239.900,000	APBD	-	1,12%	216.500,0
7	01	02	2.01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Salatiga	100%	197.900,000	APBD	-	100%	171.500
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Salatiga	7 dokumen	197.900	APBD	-	7 dokumen	171.500
7	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan</i>	Salatiga	100%	42.000	APBD	-	100%	45.000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Salatiga	2 laporan	42.000	APBD	-	2 laporan	45.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	Salatiga	50%	7.636.962,0	APBD	-	50%	8.050.000

7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Salatiga	60%	280.000	APBD	-	60%	300.000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Salatiga	7 laporan	280.000	APBD	-	7 laporan	300.000
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Salatiga	50%	7.356.962,000	APBD	-	50%	7.750.000,0
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Salatiga	7 lembaga	86.962	APBD	-	7 lembaga	100.000
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Salatiga	7 unit	3.711.658,0	APBD	-	7 unit	3.850.000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Salatiga	4 pokmas	3.558.342,00	APBD	-	4 pokmas	3.800.000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	Salatiga	100%	89.975,200	APBD	-	100%	445.000

			Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Salatiga	100%		APBD	-	100%	
7 01 05 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Terlaksananya kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Salatiga	100%	89.975,200	APBD	-	-	100%	445.000
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Salatiga	500 orang	45.115,800	APBD	-	-	500 orang	135.000
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Salatiga	1 dokumen	44.859,400	APBD	-	-	1 dokumen	310.000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	Salatiga	69,1	212.025	APBD	-	-	69,1	285.000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase penyampaian SPPT PBB kepada WP	Salatiga	93,55	212.024,800	APBD	-	-	93,55	285.000
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Salatiga	2 dokumen	146.402,400	APBD	-	-	2 dokumen	185.000
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Salatiga		65.622,400	APBD	-	-		100.000
					19.241.777,000	21.008.500				

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
KECAMATAN SIDOREJO															
7								12.111.777.000,00						13.508.500.000,00	
7.01								12.111.777.000,00						13.508.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-			100 % 69,16 nilai 88,68 nilai	11.062.915.000,00						12.012.000.000,00	
		[Meningkatkan dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 70,8 89,8	100 69,15 88,67	100 69,15 86	100 70 89	11.062.915.000,00						12.012.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	10.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistik 12 Peringk atan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan	10.000.000,00	KECAMATAN SIDOREJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	10.000.000,00	Kota Salatiga, Sidorejo, Samudra Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng kuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Kecamatan dan Kelurahan		10.000.000,00	KECAMATAN SIDOREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	NASIONAL	DAERAH	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	8.920.397.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan		10.890.000.000,00	KECAMATAN SIDOREJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	8.280.397.500,00	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan		10.800.000.000,00	KECAMATAN SIDOREJO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	640.000.000,00	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan		90.000.000,00	KECAMATAN SIDOREJO

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	2 Dokumen	19.320.000,00	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat transformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamisif 12 Peningk kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan	15	16	17	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															KECAMATAN SIDOREJO
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	3.000.000,00	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat transformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamisif 12 Peningk kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan		4.000.000,00	KECAMATAN SIDOREJO	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															KECAMATAN SIDOREJO
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	110.000.000,00	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat transformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamisif 12 Peningk kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan		150.000.000,00	KECAMATAN SIDOREJO	
	7.01.01.2.06.0010	Pentastusahaan Arsip Dinamis pada SKPD															KECAMATAN SIDOREJO

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	15.000.000.00	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan	15	17.000.000.00	KECAMATAN SIDOREJO	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	-			80 %	239.900.000.00						-	216.500.000.00		
		[Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik]	Tingkat Pencapaian Pembangunan Kelurahan dalam 1 tahun	95	0	76	80	239.900.000.00	-	-	-	-	-	-	216.500.000.00	-	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	197.900.000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan		171.500.000.00	KECAMATAN SIDOREJO	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	197.900.000.00	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan		171.500.000.00	KECAMATAN SIDOREJO	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU REKNCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	2 Laporan	280.000.000,00	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan	15	300.000.000,00	KECAMATAN SIDOREJO	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	-			100 %	226.962.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan	-	250.000.000,00	KECAMATAN SIDOREJO	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															KECAMATAN SIDOREJO
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	86.962.000,00	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan		100.000.000,00	KECAMATAN SIDOREJO	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	905.002.000,00	Kota Salatiga, Soborejo, Blotongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan standar	Masyarakat	15	1.000.000.000,00	KELURAHAN BLOTONGAN		
J U M L A H															19.241.777.000,00		21.000.500.000,00	

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SIDOREJO
KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan Renja Kecamatan Sidorejo, dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, paling sedikit memuat :
1. Pendahuluan;
 2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 5. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen rancangan akhir Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

CAMAT SIDOREJO
KOTA SALATIGA



SULISTIYONO, S.IP.,M.M.
NIP 197403081993111001

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Kabid Perenc. Ekbang BAPPEDA
Kota Salatiga



NUR KHOLIS, ST, MT
NIP. 19770704 200604 2 001

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renja
Kecamatan Sidorejo
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.		✓	Belum ada	Sudah ada
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓		Sudah sesuai	
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓		Sudah sesuai	
9.	Perumusan kegiatan prioritas.		✓	Belum sesuai	Sudah disesuaikan Hal 21
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		✓	Belum ada	Sudah ada Hal 15
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			

Formulir E.71
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Kecamatan Sidorejo
Kota Salatiga

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	Sudah ada rumusan, tapi acuan dokumen di atasnya belum yang terbaru dengan periode 25-29 TL Sudah dipenuhi hal 2
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Untuk program kegiatan mendukung prioritas kota, prov dan nasional belum ada TL Sudah dipenuhi hal 19

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.		✓	Akan di sahkan setelah perbaikan ini	

Formulir Verifikasi Sistematika Renja PD Tahun 2026

Kecamatan Sidorejo

Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
I.1	Latar belakang	Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2026 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja PD	✓		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2026, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	✓		- Tambahkan perda provinsi jawa tengah tentang RPMPD Perda no 7/2025 - Perda yang tidak berlaku agar dihapus - RPD 23-26 mohon di hapus saja, karena sudah ada rpjmd (Sudah di TL hal 3)
I.3	Maksud dan tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD	✓		Struktur organisasi, profil, inventaris tidak perlu di masukkan pada subbab maksud dan tujuan (Sudah di sesuaikan pada hal 3)
I.4	Sistematika penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renja PD	✓		2.4 adalah review analisis kebutuhan dengan rkpd bukan rancangan awal (sudah disesuaikan hal 5)
II.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 & Capaian Renstra PD Tahun 2024	Tabel evaluasi Renja Tahun 2024 Tabel T-C. 29	✓		
II.2	Analisa Kinerja Pelayanan	IKU, SPM, IKK, Uraian Indikator yang belum memenuhi target Tabel T-C. 30	✓		
II.3	Permasalahan dan Isu Strategis PD	1. Sejauh mana Tingkat kinerja PD dan hal kritis terkait pelayanan; 2. Permasalahan dan hambatan yg dihadapi; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi KaDa, tuj dan sasaran Pemda dan program prioritas; 4. Tantangan dan peluang; 5. Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan dalam perumusan program dan kegiatan priotas tahun n.	✓		Permusan permasalahan dan isu strategis harap memperhatikan pedoman yang ada di samping (Sudah ada TL hal 11) Belum ada Dampaknya terhadap pencapaian visi misi KaDa, tuj dan sasaran Pemda dan program prioritas;

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
					(Sudah TL hal 12)
		Isu strategis sesuai dengan menyimpulkan dari: a. Permasalahan b. Indikator yang belum dicapai	✓		Mohon untuk disesuaikan (Sudah TL hal 10)
II.4	Review terhadap RKPD	Tabel review RKPD dan Analisis Kebutuhan Tabel T-C. 31	✓		Review thdp Renstra 2025-2029 yang menjadi acuan (masuk pada dokumen rancangan Awal renja), akan tetapi yg di cantumkan disini Adalah data dari RKPD dan Analisis kebutuhan (Sudah TL hal 13)
II.5	Penelaahan Usalan Program dan Kegiatan Masyarakat	1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Tabel T-C.32	✓		Lengkapi dengan data usulan dari Pokir, Musrenbang maupun Hibah. (Sudah TL hal 13)
III.1	Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.	✓		Sesuaikan periodesasi acuan dokumen di atasnya, menggunakan dokumen 25-29 Acuan Nasional, Provinsi serta RPJMD kota (Sudah TL hal 14)
III.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2026	Tujuan dan sasaran mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029		✓	Lengkapi dengan indikator tujuan dan sasaran Renstra 25-29 untuk tabel disini dapat dialihkan ke sub 3.3 yang program dan kegiatan (Sudah TL hal 20)
III.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029 Berisikan Penjelasan mengenai: 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;	✓		Sesuaikan dengan ketentuan (Sudah TL hal 18)

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; 4. Melampirkan rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan tabel T-C.33			
IV.1	Rencana Kerja dan Pendanaan	beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif (cetak renja dari SIPD RI)		✓	Download dari SIPD RI (Sudah TL Hal 22)
V	Penutup	Bab ini memuat diantaranya 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3. Rencana tindak lanjut.		✓	- Sesuaikan narasi dengan kaidah di samping - TTD penutup oleh wali kota (Sudah TL Hal 23-25)



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KECAMATAN SIDOREJO

Jalan Ki Penjawi No. 19 Salatiga Kode Pos 50714 Telepon (0298) 323977
situs <http://sidorejo.salatiga.go.id> surat elektronik sidorejo@salatiga.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SIDOREJO KOTA SALATIGA
NOMOR:000.8.5/509

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

CAMAT SIDOREJO,

- Menimbang : 1. Bahwa bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, maka perlu dibentuk tim;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sidorejo Kota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4421
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 10);
16. Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. melakukan pengumpulan data pendukung penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.
 - b. melakukan pembahasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.
 - c. melakukan pengumpulan data dan pembahasan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
 - e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Camat Sidorejo Kota Salatiga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal, 10 September 2025

CAMAT SIDOREJO
KOTA SALATIGA



SULISTIYONO, S.IP, M.M

Tembusan:

1. Walikota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
4. Kepala BPKPD Kota Salatiga.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SIDOREJO
KOTA SALATIGA
NOMOR : 000.8.5/509
TANGGAL : 10 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM BADAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Penasehat
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
5.	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

CAMAT SIDOREJO
KOTA SALATIGA

SULISTIYONO, S.IP, M.M